

Brunei: Aktor Baru di Asia Tenggara*

A.R. SUTOPO

Setelah tanggal 31 Desember 1983, dengan berakhirnya masa protektorat Inggris, Kesultanan Brunei memperoleh kemerdekaan penuhnya. Perubahan yang paling penting dalam hal ini ialah bahwa Brunei sejak saat itu memikul sendiri politik luar negeri dan pertahanannya.

Pada tahun 1888 antara Inggris dan Brunei tercapai kesepakatan bahwa Brunei berada di bawah protektorat Inggris. Sultan Brunei dan para penerusnya menjalankan politik dan administrasi pemerintahan di dalam negeri, sementara Inggris bertanggung jawab atas hubungan luar negerinya. Tahun 1906 tercapai suatu persetujuan bahwa Sultan Brunei bersedia bertindak atas nasihat Inggris dalam semua masalah kecuali soal-soal yang berkaitan dengan atau berpengaruh terhadap agama Islam dan adat-istiadat. Persetujuan yang dibuat dalam tahun 1959, dan diperkuat tahun 1971, menyebutkan bahwa Inggris bertanggung jawab atas masalah luar negeri dan pertahanan Brunei. Dalam tahun 1959 itu juga untuk pertama kalinya Brunei menetapkan suatu Undang-undang Dasar yang antara lain menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi berada pada Sultan dan satu klausula mengenai pemilihan sebagian dari anggota-anggota Dewan Legislatif.

Persetujuan persahabatan dan kerjasama yang dicapai tahun 1979 menyebutkan bahwa Brunei akan merdeka penuh pada tanggal 1 Januari 1984. Dalam jangka waktu lima tahun itu Brunei diharapkan telah dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan politik luar negeri dan pertahanan. Dalam pengertian itulah Brunei akan memperoleh kedaulatan dan kemerdekaan penuhnya. Oleh karena itu perubahan status Brunei menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh bukanlah

*Karangan ini pernah dimuat di *Suara Karya*, 3 Januari 1984. A.R. Sutopo adalah staf CSIS.

merupakan suatu proses "dekolonisasi" seperti yang kita mengerti hingga sekarang, yang bertolak dari status "koloni" ke kemerdekaan.

Sejarah Brunei pada umumnya selalu stabil, kecuali dalam periode yang relatif singkat pada awal dasawarsa 1960-an. Bulan Mei 1961, Tengku Abdul Rahman dalam suatu pidatonya mengusulkan dibentuknya Federasi Malaysia yang terdiri dari Semenanjung Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei. Pada bulan Agustus 1962 di Brunei diselenggarakan suatu pemilihan umum untuk mengisi kursi Dewan Legislatif yang dipilih. Semua kursi untuk itu dimenangkan oleh Partai Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M. Azahari. Tetapi dia tidak dapat membentuk pemerintahan oleh karena kursinya dalam dewan perwakilan tersebut tidak lebih besar dari jumlah anggota yang diangkat (16-16). Azahari melakukan pemberontakan, dengan mendapatkan dukungan dari Indonesia pada waktu itu, yang kemudian berakibat dibekukannya konstitusi dan Sultan Brunei memilih tidak bergabung dengan Malaysia. Pemberontakan Azahari berhasil dipadamkan dengan bantuan Inggris.

Peristiwa awal dasawarsa 1960an itu ternyata membawa akibat adanya semacam kecurigaan di Brunei terhadap dua negara tetangganya itu, yaitu Malaysia dan Indonesia. Trauma pemberontakan PRB selalu membayangi politik Brunei. Penolakan Brunei untuk bergabung dengan Malaysia mengecewakan Malaysia; karena itu dalam kaitan ini kemudian Malaysia memberikan dukungan terbuka kepada PRB. Brunei kemudian mempersoalkan status Limbang -- wilayah Malaysia yang memisahkan Brunei menjadi dua bagian -- dengan Malaysia karena menganggap wilayah ini dipergunakan sebagai pangkalan PRB dalam melakukan subversi dan Azahari tidak meninggalkan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya terhadap Indonesia, kecurigaan Brunei berpangkal dari dukungan Indonesia pada masa lalu kepada pemberontakan Azahari dan memberikan perlindungan serta pengakuan bagi pemerintahan Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang diproklamasikan oleh Azahari. Walaupun terdapat ketakutan akan timbulnya suatu pemberontakan lagi di Brunei, dengan mendapatkan dukungan dari salah satu negara tetangganya, tidak terdapat gejolak politik dan keamanan yang berarti di sana setelah pemberontakan PRB, yang kemudian dilarang sebagai akibat pemberontakan tahun 1962 itu.

Perubahan sikap Brunei terhadap dua negara tetangganya itu terjadi setelah tahun 1978. Dalam suatu pertemuan di Labuan pada tanggal 17-18 Mei 1978, Presiden Soeharto dan PM Hussein Onn antara lain juga membicarakan masalah Brunei. Kedua pemimpin itu mendukung adanya penentuan nasib sendiri rakyat Brunei dalam konteks keamanan dan stabilitas di kawasan, dan menyatakan harapan akan masuknya Brunei ke dalam ASEAN setelah kemerdekaan penuh dicapainya. Dengan perkataan lain, stabilitas dan

keamanan regional, menurut pandangan para pemimpin Indonesia dan Malaysia, menghendaki masuknya Brunei ke dalam ASEAN. Pencalonan pertama bagi keanggotaan Brunei ke dalam ASEAN terjadi pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada bulan Juni 1981. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok pada bulan Juni 1983, Menteri Besar Brunei menyatakan keputusan Brunei sendiri untuk menjadi anggota ASEAN setelah kemerdekaannya. Untuk itu, pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1984 akan diselenggarakan untuk secara resmi menerima Brunei sebagai anggota ASEAN. Dengan demikian, Brunei akan menjadi anggota ASEAN pertama sebagai unsur non-pendirinya.

Redanya kecurigaan Brunei terhadap Malaysia, dan sampai tingkat tertentu terhadap Indonesia, diikuti oleh meningkatnya kunjungan-kunjungan bilateral yang semakin mempererat hubungan mereka. Datuk Hussein Onn menghadiri pesta perkawinan kerajaan di Brunei pada bulan Juli 1979. Kantor perwakilan untuk masing-masing negara dibuka pada awal tahun 1982 setelah kunjungan resmi Sultan Brunei ke Malaysia pada bulan September 1981. Sultan Brunei berkunjung ke Indonesia pada bulan April 1981. Kemudian Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja mengunjungi Brunei pada bulan Agustus 1982. Demikian pula peningkatan hubungan antara Brunei dan Singapura terjadi, baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orientasi-luar negeri Brunei dalam masa persiapan kemerdekaan penuh pertama-tama dan terutama adalah ASEAN.

Di Asia Tenggara Brunei terletak pada suatu titik pusat. Di sebelah Utara Brunei terbentang Laut Cina Selatan yang kemudian disambung oleh daratan Indocina; di sebelah Barat terbentang Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Muangthai; di sebelah Timur terpapar wilayah Malaysia, Indonesia, dan Pilipina; dan di sebelah Selatan wilayahnya dikelilingi oleh Malaysia dan Indonesia. Ini adalah kedudukan yang menyolok bagi Brunei, yang menghadap ke Laut Cina Selatan yang ramai dengan lalu-lintas laut baik untuk armada dagang maupun militer. Brunei memiliki suatu pelabuhan laut yang relatif paling baik di wilayah Laut Cina Selatan, kecuali pelabuhan laut Singapura dan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Subic Bay.

Selain kedudukan geografisnya yang demikian itu, Brunei kaya akan minyak bumi dan gas alam -- dua komoditi ekspor utama yang menunjang kehidupan dan kekayaan negeri itu dewasa ini. Dengan luas wilayah 2.226 mil (5.765 km) persegi, sedikit lebih luas dibandingkan dengan Pulau Bali, dan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 200.000 orang, Brunei terhitung sebagai suatu negara yang kecil bila dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang mengitarinya. Dalam jumlah penduduk, itu berarti sekitar seperduabelas penduduk Singapura, atau sepertujuh ratus limapuluh penduduk Indonesia.

Tetapi dilihat dari pendapatan per kapita per tahun, Brunei termasuk negara terkaya di Asia dengan GNP per kapita lebih dari US\$10.000. Mengingat kekayaan dan kedudukan geografisnya itu, meskipun "kecil" Brunei memiliki potensi besar untuk memainkan peranan yang penting di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam rangka ASEAN.

Dengan jumlah penduduk yang sangat kecil bila dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, masalah pertahanan dapat menjadi soal yang serius bagi Brunei yang merdeka penuh. Kekuatan Angkatan Bersenjata hanya sekitar 3.500 orang saja dengan persenjataan yang tidak lebih baik dari negara-negara tetangganya. Meskipun setelah kemerdekaan ini batalyon Gurkha Inggris masih akan dipertahankan kehadirannya, keterbatasan Brunei tidak akan membuatnya menjadi suatu kekuatan militer yang berarti di kawasan. Tetapi lebih penting adalah bahwa hubungan Brunei yang baik dengan Indonesia dan Malaysia maupun negara-negara tetangga yang lain dalam rangka ASEAN akan memperkuat keamanan dan stabilitas negara itu. Itu berarti juga bahwa masuknya Brunei menjadi anggota ASEAN dapat memperteguh stabilitas dan keamanan kawasan.

Dari jumlah penduduk Brunei sekitar 200 ribu orang itu, kira-kira 65% adalah suku Melayu, 20,5% orang-orang Cina, 8% adalah dari suku-suku Iban, Dusun, dan suku-suku lainnya, 3% keturunan India, dan dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dari orang-orang India adalah orang-orang Inggris (expatriates). Menurut kategori kewarganegaraannya, 66,2% dari jumlah penduduk berstatus warga negara Brunei, 10,5% berstatus penduduk tetap (permanent residents), dan 21% adalah penduduk sementara (temporary residents). Sebagian besar orang-orang Cina adalah bukan warga negara Brunei. Mereka adalah pemegang paspor Inggris, yang akan menjadi orang-orang tak berkewarga-negaraan (stateless) pada hari kemerdekaan Brunei, kecuali apabila ada upaya-upaya untuk mengaturnya secara lain.

Ideologi negara Brunei berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, nasionalisme, dan demokrasi. Negara ini berbentuk kesultanan yang dikepalai oleh seorang Sultan, dan yang berkuasa kini adalah Sultan Sir Muda Hassan al Bolkiah. Keluarga istana menduduki jabatan-jabatan terpenting dalam pemerintahan Brunei yang baru saja diumumkan sementara penasihat-penasihat berkebangsaan Inggris masih berperanan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan administrasi negara.

Sebagai suatu negara yang menjadi kaya berkat minyak dan gas bumi, Brunei juga menyadari arti penting pemerintahan dan administrasi yang bersih. Dikeluarkannya semacam undang-undang anti korupsi dan dibentuknya Biro Anti Korupsi menunjukkan bahwa di negara yang kaya ini korupsi menjadi salah satu masalah yang dapat mengganggu ketenteraman dalam masa

depan. Biro yang dibentuk pada permulaan tahun 1982 ini mengambil alih tugas dari Departemen Keamanan dan Penyidikan yang dibubarkan pada tahun 1980 karena dinilai tidak efektif. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Biro Anti Korupsi ini bertanggung jawab kepada Sultan sembari mendorong masyarakat untuk menyampaikan laporan-laporan mengenai penyelewengan dan tindak korupsi.

Persoalan politik yang tampaknya serius bagi Brunei, yang belum juga terselesaikan, adalah masalah orang-orang Cina yang menetap di sana. Di samping mereka akan menjadi penduduk yang tidak berkewarganegaraan, keraguan orang-orang keturunan Cina pada masa depannya juga dipengaruhi oleh pernyataan Datuk Abdul Aziz, pejabat Menteri Besar pada waktu itu dan kini jabatan itu dihapuskan, pada bulan Agustus 1982 bahwa pemerintah akan memberikan prioritas peranan yang lebih besar kepada penduduk pribumi dalam sistem perekonomian Brunei. Orang-orang keturunan Cina sangat berperanan di bidang perdagangan dan eceran. Kalau hal itu terjadi, dorongan orang-orang keturunan Cina untuk meninggalkan Brunei menjadi lebih besar. Tetapi mengingat keterbatasan jumlah penduduknya dan ketergantungan Brunei pada tenaga kerja pendatang, tampaknya agak kecil kemungkinan bagi Brunei untuk menerapkan suatu kebijaksanaan yang akan merugikan suatu kelompok minoritas yang secara ekonomi berperanan penting. Di lain pihak, Sultan meminta agar usahawan-usahawan keturunan Cina tidak memandang pengusaha-pengusaha pribumi sebagai saingannya, dan Sultan meminta bantuan mereka untuk mengembangkan kecakapan orang-orang pribumi demi kepentingan dan keuntungan mereka semua. Hal ini merupakan salah satu faktor dalam mendefinisikan ajaran "nasionalisme" dalam ideologi negara Brunei.

Hal lainnya yang tampaknya akan berpengaruh pada kehidupan di dalam negeri Brunei adalah peranan politik masyarakat dalam menunjang demokrasi di sana. Pemilihan umum tahun 1962 yang dimenangkan oleh PRB, yang kemudian berakibat pemberontakan PRB dan dicabutnya kembali konstitusi dan diberlakukannya keadaan darurat, merupakan pengalaman Brunei dalam berdemokrasi. Kini makin banyak penduduk, termasuk penduduk Melayu, yang makin tinggi tingkat pendidikannya. Karena itu dalam menghadapi masa depannya, pemikiran mengenai struktur pemerintahan, alokasi kekuasaan, peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan, adalah beberapa di antara persoalan-persoalan yang harus ditangani oleh Brunei untuk melengkapi kemakmuran yang makin dirasakan oleh negara ini.

ANALISA 1978—1984

Nomor-nomor Tahun 1978 s/d 1983 @ Rp 500,00

- 1/1978: PERSPEKTIF 1978 (habis)
- 2/1978: VIETNAM-KAMBOJA, SELAT MALAKA DAN MASALAH RASIAL (habis)
- 3/1978: PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA (habis)
- 4/1978: DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL (habis)
- 5/1978: KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
- 6/1978: STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA
- 7/1978: BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
- 8/1978: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 9/1978: NEGARA-NEGARA ASEAN
- 10/1978: SUMPAAH PEMUDA DAN PERSATUAN INDONESIA
- 11/1978: PERSAINGAN TIMUR-BARAT
- 12/1978: PEMBINAAN GENERASI MUDA

- 1/1978: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 2/1979: BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN (habis)
- 3/1979: TIMUR TENGAH DALAM SOROTAN
- 4/1979: PERATAAN PENDAPATAN
- 5/1979: FOKUS ATAS AFRIKA
- 6/1979: PERJUANGAN DUNIA BARU
- 7/1979: PERANG MELAWAN KEMISKINAN (habis)
- 8/1979: ASIA TENGGARA BERGOLAK
- 9/1979: STRATEGI PEMBANGUNAN DITINJAU KEMBALI
- 10/1979: MENANJAKNYA DAN PROSPEK KAWASAN PASIFIK
- 11/1979: MENUJU PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL
- 12/1979: AKTUALITAS INTERNASIONAL

- 1/1980: BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL
- 2/1980: PEDESAAN FOKUS PEMBANGUNAN (habis)
- 3/1980: KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN
- 4/1980: MENGAMANKAN SUPLAI ENERGI
- 5/1980: KAWASAN SAMUDRA HINDIA FOKUS KETEGANGAN
- 6/1980: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 7/1980: JEPANG DALAM DUNIA YANG BERUBAH
- 8/1980: PERJUANGAN KEADILAN SOSIAL
- 9/1980: ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN
- 10/1980: PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT
- 11/1980: PERKEMBANGAN DI AFRIKA
- 12/1980: WANITA, HAKIKAT DAN PANGGILANNYA

- 1/1981: BERBAGAI MASALAH NASIONAL
- 2/1981: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1981: PEMBANGUNAN PEDESAAN (habis)
- 4/1981: RRC, CALON RAKSASA DUNIA (habis)
- 5/1981: ORIENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL
- 6/1981: TIMUR TENGAH PUSARAN STRATEGIS
- 7/1981: SEGI-SEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- 8/1981: PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA
- 9/1981: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
- 10/1981: ASIA-PASIFIK DASAWARSA 1980-AN
- 11/1981: PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI
- 12/1981: PERTARUNGAN TIMUR-BARAT

- 1/1982: PERSPEKTIF EKONOMI
- 2/1982: FOKUS ASIA TENGGARA
- 3/1982: DEMOKRASI SOSIAL
- 4/1982: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 5/1982: INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
- 6/1982: HUBUNGAN UTARA-SÉLATAN
- 7/1982: PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
- 8/1982: PERSPEKTIF ASIA-PASIFIK
- 9/1982: MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN
- 10/1982: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 11/1982: GARIS-GARIS BESAR PEMBANGUNAN PEDESAAN
- 12/1982: FOKUS KAWASAN SAMUDRA HINDIA
- 1/1983: SOSIALISASI
- 2/1983: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1983: PEMBANGUNAN POLITIK
- 4/1983: DINAMIKA ASIA-PASIFIK
- 5/1983: BUNGA RAMPAI PEMBANGUNAN
- 6/1983: PERKEMBANGAN DI ASIA SELATAN DAN BARAT
- 7/1983: MENGGALAKKAN PARTISIPASI EKONOMI
- 8/1983: ASIA TENGGARA DAN DUNIA
- 9/1983: DINAMIKA INTERNASIONAL
- 10/1983: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- 11/1983: MENUJU STRATEGI ENERGI
- 12/1983: UNI SOVIET DAN RRC

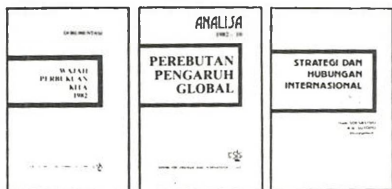
Nomor-nomor Tahun 1984 dan seterusnya @ Rp 750,00

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN INDONESIA-VIETNAM
- 5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- 6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI
- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN
- 11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

Jilidan ANALISA

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ANALISA 1979 Rp 9.000,00 | ANALISA 1982 Rp 9.000,00 |
| ANALISA 1980 Rp 9.000,00 | ANALISA 1983 Rp 9.000,00 |
| ANALISA 1981 Rp 9.000,00 | ANALISA 1984 Rp 11.000,00 |

Pesanan per pos tambah ongkos kirim $\pm 15\%$
(minimal Rp 200,00) ke Biro Publikasi CSIS.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/ bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:
BIRO PUBLIKASI — CSIS
 CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan **PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS** yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

